

# **Peran Media dalam *Cyberspace*, *Informational Politics*, dan *Public Sphere***

**Fritska Emelia**

*Program Studi S1 Departemen Hubungan Internasional  
Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Selain meniadakan batasan ruang, jarak dan waktu, globalisasi juga menghadirkan aktor-aktor bukan negara seperti korporasi media. Isu-isu yang muncul juga tidak selalu berpusat pada hard politic namun juga soft politic. Satu hal yang paling nampak dalam globalisasi ialah adanya demokrasi. Globalisasi melalui media kemudian mendorong masyarakat yang semula mengadakan interaksi secara konvensional dalam publicsphere, mulai terhubung dalam suatu dunia virtual atau cyberspace. Identitas bukan lagi menjadi hal yang penting, melainkan opini publik yang terbentuk setelahnya. Opini publik ini nantinya akan mempengaruhi politik baik dalam maupun luar negeri. Atau dengan kata lain, cyberspace dan publicsphere berkapasitas membentuk politik informasional yang tidak dibatasi oleh jabatan politis saja, namun politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi informasi dan teknologi dalam media. Penelitian ini akan melihat hubungan sirkular media, cyber space, publicsphere dan politik informasional, terangkum dalam studi kasus demokratisasi Mesir melalui peranan jejaring sosial.*

**Kata Kunci:** *cyber space, publicsphere, politik informasional, media*

*Besides abolish the boundary of space, distance, and time, globalization shows the existence of non-state actors such as media corporation. The emerging issues do not always focus on hard politic, but also soft politic. One thing that happens the most in globalization is democracy. Through the media, globalization sparks peoples to have interaction in a virtual world or cyberspace, whereas they interact conventionally in publicsphere at first. Identity is no longer become an important thing, but public opinion. Public opinion will take effect in domestic politic even foreign politic. In other words, cyberspace and publicsphere have capacity to create informational politic which unlimited with position in politic only, but also politic which affect and affected by information technology in media. This research will show how does the circular relation between media, cyber space, publicphere, and informational politic in Mesir democratization case, through the role of social media.*

**Keywords :** *cyber space, publicsphere, informational politic, media*

Istilah '*cyberspace*' pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson, seorang penulis fiksi ilmiah sebagai "...was a consensual hallucination that felt and look like a physical space but actually was a computer-generated construct representing abstract data" (Gibson 1984). *Cyberspace* sama dengan *virtual space* yang berarti ruang maya, suatu lokasi imajiner tempat aktivitas elektronik dilakukan. Atau bisa juga diartikan sebagai proses menjadi sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer networks*).

Moore berargumen bahwa *cyberspace* merupakan integrasi atau rasionalisasi secara natural dan tidak terhindarkan dari *special-purpose network* yang membentuk sistem saraf masyarakat modern akibat semakin rumit dan berkembangnya infrastruktur yang ada, seperti penyiaran melalui satelit, kabel, telepon baik umum dan seluler, internet dan alat elektronik lainnya (Moore 1999, 39). Pendapat itu didukung oleh Castells yang menyatakan bahwa *cyberspace* merupakan wadah baru bagi masyarakat untuk menciptakan perubahan politik, menghindari terjadinya konflik antara pasar bebas dan pasar tertutup, serta untuk mengatasi perpecahan karena jarak antara masyarakat yang inklusif dan eksklusif. Ruang ini tidak lain merupakan hasil dari transformasi teknologi yang ada (Castells 1997, 367).

Sementara *publicsphere* merupakan tempat dimana semua orang bisa berkomunikasi, menyampaikan gagasannya secara bebas, langsung, tanpa adanya otoritas yg mengatur, tidak ada ambisi melainkan skadar ekspresi masing-masing anggota publik (Subiakto 2012). Karenanya, penulis mengambil posisi bahwa *cyberspace* akan membentuk *netizen* yang dapat memberikan opini publik untuk membentuk politik yang informasional dan menumbuhkan demokratisasi yang mendorong terciptanya *publicsphere*. Atau dengan kata lain tiga nosi ini saling mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang sirkular.

Dalam pembahasan kali ini, penulis mengangkat studi kasus peran media dalam demokratisasi di Mesir, dimana studi terdahulu dari University of Washington telah menyebutkan bahwa media sosial berkontribusi penting dalam revolusi yang tengah bergolak di Tunisia dan Mesir. Jutaan tweet, ribuan video, dan ribuan posting blog mampu mengartikulasi suara rakyat yang menginginkan demokrasi setelah 60 tahun dipimpin pemerintahan yang diktaktor. Media digital dipilih oleh rakyat sebagai sarana menggulingkan pemerintahan, sebab kebanyakan diktator tidak memiliki strategi media sosial. Jumlah tweet di Mesir melonjak drastis dari 2.300 menjadi 230 ribu pada seminggu sebelum

Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri. Kata 'pembebasan' juga menjadi kata yang paling banyak muncul dalam konten demokrasi Mesir di internet (Howard 2011 dalam teknologi.news.viva.co.id t.t.). Dukungan internasional kemudian menguatkan semangat rakyat Tunisia dan Mesir untuk turun ke lapangan dan jalan-jalan Tahrir pada 18 November 2011. Mereka berdemonstrasi dengan damai dengan tuntutan agar pemerintahan segera dikembalikan kepada rakyat sipil paling lambat Mei 2012 dan mencabut keputusan Ali Silmi yang memberikan ruang dwifungsi militer (Fathoni 2011). Aksi masyarakat tersebut diliput oleh beberapa media lokal dan internasional seperti *VoA* (*Voice of America*) (voaindonesia.com 2013), BBC (bbc.co.uk t.t.), CNN (edition.cnn.com 2011) dan lainnya.

Media tidak diragukan memiliki andil dalam penyebaran demokrasi dimana semua orang dapat terhubung dan menawarkan berbagai informasi yang akan diteruskan kepada yang lain (Moore 1999, 40). Dari studi kasus ini, penulis menganalisa bahwa populernya penggunaan jejaring sosial telah menciptakan *netizen* yang terhubung melalui *interconnected computer networks* dari berbagai negara dan membentuk diskusi-diskusi *cyberspace* membahas visi mereka untuk menghadirkan keadilan melalui demokrasi di Mesir. Alasan rakyat Mesir lebih memilih *cyberspace* untuk menggalang aksi politik lewat jejaring sosial sebagai mediana erat kaitannya dengan pengawasan media konvensional di negara tersebut, sebab selama ini rakyat tidak dapat mengakses media cetak dalam negeri yang dikuasai oleh kroni Hosni Mubarak (Fathoni 2011). Dalam *cyberspace*, terjadi pembauran seluruh lapisan masyarakat dalam membawa pesan-pesan, tidak peduli pria atau wanita, pekerja, pelajar, pengusaha, semuanya bersatu padu bertukar pikiran bahkan sampai melakukan unjuk rasa. Untuk menyuarakan gagasan secara langsung, tanpa intervensi otoritas tertentu sudah merupakan manifestasi dari *publicsphere*, apalagi jika ada agenda tertentu seperti tuntutan demokrasi, menjadikan *publicsphere* tidak hanya sebagai ruang menunjukkan ekspresi publik semata, tapi juga melibatkan masyarakat sipil di dalamnya.

Namun tidak selamanya *cyberspace* dalam media menawarkan keuntungan. Lyon (2002, 25) menyatakan ambiguitas bahwa bagaimana pun tetap ada pihak-pihak yang mengontrol dan mengawasi media, sehingga *cyberspace* sebenarnya merupakan sebuah ketidakrealitasan. Ini nampak dari masih terjadi monopoli negara atas surat kabar di Mesir bernama *Al-Ahram*, *Al-Akhbar* dan *Al-Gumhuriya*. Meski secara *online* media-media ini menampilkan berita-berita demokrasi dan diskursus oleh rakyat namun ketiganya masih melakukan politik pencitraan

Mubarak, bahkan dilansir menjadi donatur kebutuhan Mubarak selama di penjara ([english.ahram.org.eg](http://english.ahram.org.eg) 2013). Menurut Castells (1997, 369), intervensi kelompok atau negara dalam kepemilikan media membuat informasi yang disebarkan oleh media seringkali berpihak terhadap sudut pandang pemilik media tersebut. Tidak jarang pula pemilik media menggunakan pengaruhnya dalam membentuk opini publik untuk mendapatkan posisi tertentu dalam pemerintahan yang berkuasa. Terbukti bahwa editor dari ketiga media ini ditunjuk langsung oleh presiden, tidak hanya itu Al Ahram telah melakukan banyak sensor pada berita yang dianggap mengurangi legitimasi pemerintahan Mubarak dengan alasan sebagai bentuk loyalitas kepada negara. Al Ahram juga menunjukkan beberapa sentimen terhadap oposisi yaitu Partai Demokrat Nasional, dan tidak banyak mempublikasikan kritik langsung terhadap pemerintahan Mubarak ([pressreference.com](http://pressreference.com) t.t.)

Sebanyak 14 partai politik di Mesir juga memiliki media yang bersaing dengan tiga media milik pemerintah di atas. Pemerintah membebaskan partai untuk melansir koran mereka sendiri. Meski lebih demokratis, representatif dan bersaing, namun pada kenyataannya mereka melakukan hal yang kurang lebih sama dengan media pemerintah, seperti melakukan sensor. Hal ini erat kaitannya dengan subsidi dan porsi bagi partai untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang ditawarkan pemerintah. Diketahui Partai *Al-Wafd* mengeluarkan surat kabar secara mingguan, partai *Al-Ahrar* mengeluarkan surat kabar secara harian, sementara partai Buruh Sosialis Islam bernama *Al-Shaab* melansir secara semi mingguan, dan ketiga Partai ini diketahui mengeluarkan berita yang berat sebelah mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa ([www.pressreference.com](http://www.pressreference.com) t.t.).

Tidak jauh berbeda dengan media independen domestik yang telah mengantongi izin sekalipun. Perlu digarisbawahi bahwa adalah sulit bagi suatu perusahaan surat kabar untuk mendapatkan ijin di Mesir, mereka harus melewati badan keamanan dan intelijen negara terlebih dahulu. Bahkan dalam operasinya, mereka diawasi oleh State Information Service dan harus menjual koran dari media independen dengan harga sangat mahal ([pressreference.com](http://pressreference.com) t.t.). Bisa dikatakan hampir seluruh media cetak di Mesir tidak ada yang benar-benar demokratis sebab semuanya mengalami intervensi dari pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Tidak mengherankan bila rakyat Mesir lebih memilih menggunakan internet terutama jejaring sosial. Sebab selain karena tidak dikenakan biaya untuk membuat akun, mereka juga dapat merencanakan identitas sehingga sulit untuk dilacak (Rheingold t.t.). Namun yang terpenting daripada itu adalah jejaring

sosial bebas dari intervensi negara. Tabel di bawah menunjukkan terjadi tren peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat Mesir.

Peran media dalam *cyberspace* dalam mempengaruhi pemerintahan merupakan sebuah bentuk politik informasional dengan karakteristik yang berbeda dengan politik tradisional, terutama pada substansi politik itu sendiri. Poin penting yang patut digarisbawahi adalah kehadiran media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar dan internet yang telah menjadi ruang khusus bagi politik (Volkmer dalam Castell 1997).

Perbedaan antara politik informasional dan politik tradisional terletak pada relasi kepemilikan informasi dengan jabatan politis. Jika tradisional membahas urusan yang lebih privat (hubungan langsung antara dua pihak, biasanya pada negara yang monarki dan parlementer), mereka yang memiliki informasi harus dekat dengan pejabat politik, apabila tidak, informasi tersebut tidak dapat diaplikasikan sebab tidak memiliki *power* dalam pemerintahan. Sementara politik informasional ditandai dengan arus informasi argumentatif untuk mencari kebenaran (*truth*) dan tidak perlu punya relasi dekat dengan petinggi. Dalam politik tradisional aktor jelas harus menjabat secara politis dimana jabatan tersebut didapat dengan cara-cara konvensional seperti kampanye tatap muka secara langsung dengan masyarakat. Sementara dalam politik informasional, aktor tidak harus selalu menjabat secara politis selama ia memiliki informasi dan relasi dengan media. Karenanya, perlu dikaji lebih dalam batasan-batasan antara mana yang riil dan virtual melalui tiga konsep di bawah ini.

### ***Place, Space dan Sphere***

Terdapat perbedaan antara *place*, *space* dan *sphere*. *Place* dikarakteristikan dengan batasan yang tegas, kekuasaan ditentukan oleh pemegang jabatan politik, bukan oleh siapa yang menguasai informasi. *Place* dibatasi oleh kondisi geografis sehingga interaksi langsung yang lebih diutamakan. Sementara dalam *space*, terdapat batasan namun tidak riil dan tidak privat, kekuasaan ditentukan oleh jabatan politis dan banyaknya informasi yang dimiliki, karenanya dibutuhkan media massa sebagai bentuk interaksi tidak langsung antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan *sphere* berkebalikan dari *place*. *Sphere* tidak memiliki batasan, semua orang dapat memberikan dan mengambil

informasi tanpa identitas, tidak bergantung pada media massa melainkan suara.

Dari ketiga batasan tersebut di atas, yang paling demokratis menurut penulis ialah *place*, sebab *place* tidak diharuskan memiliki informasi dan dibebaskan untuk bertemu siapa saja. Sementara *space* menjadi demokratis ketika ia dapat mengakomodasi semua suara, namun seringkali terbentur kontrol yang kuat dari yang menguasai *place*, contohnya beberapa negara yang memblok beberapa situs tertentu di internet. Sedangkan *sphere* memungkinkan semua berpartisipasi meski tanpa jabatan politis dan informasi, tidak ada kekuatan yang menghentikan diskusi dan lebih demokratis dari *space*. Namun kekurangannya adalah demokrasi yang tercipta hanya secara virtual dan belum tentu dapat dimanifestasikan ke dalam negara tanpa mobilisasi massa yang kuat seperti di Mesir, selain itu terjadi bias identitas sehingga ada beberapa suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan justru menimbulkan *chaos*.

Tidak semua *cyberspace* itu *publicsphere*, contohnya ketika masyarakat menulis pemikirannya di blog namun memilih opsi *private* untuk membatasi hanya orang tertentu saja yang dapat membaca. Sementara tidak semua *publicsphere* itu *cyberspace* seperti ketika segelintir orang berdiskusi mengenai topik tertentu di suatu kedai kecil terpencil. Dalam kapasitas penulis, dua contoh di atas belum bisa disebut demokratis secara menyeluruh sebab masih ada batasan-batasan yang mengatur kebebasan individu dalam beraspirasi baik secara tempat maupun publikasi. Karena bagaimana pun masyarakat masih berada di bawah subordinasi kaum borjuis yang membangun sistem demokratis tersebut.

### **Globalisasi dalam *Cyberspace* dan *Publicsphere***

Dalam globalisasi, peran media terutama media elektronik dalam perubahan sosial sangatlah penting. Menurut analisis globalisasi secara sosiologi dan kultural (seperti Giddens 1999 dan Tomlimson 1999), media seperti televisi satelit, internet, komputer, telepon genggam dan sebagainya mampu meningkatkan keterhubungan (*interconnectedness*) jarak dan fleksibilitas interaksi sosial. Lebih lanjut, perusahaan media seperti Time-Warner-AOL, Disney, konglomerat Rupert Murdoch dan Bill Gates telah menjadi ikon globalisasi. Begitu juga CNN, BBC World, Euronews, Sky News dan Star News yang melayani berita-berita

transnasional. Dengan fasilitas layanan *online* dan penayangan secara langsung (*live*) membuat jarak tempat dan waktu bukan masalah besar.

Ini secara paralel juga menyebabkan perubahan gradual dalam wilayah sosial dan komunikasi politik. Keterikatan *cyberspace*, *publicsphere* dan opini publik tidak lagi dipertanyakan. Banyak *publicsphere* yang muncul sebagai forum diskusi politik dan pembentukan opini yang merupakan hasil interaksi beberapa negara yang berbeda yang saling terkoneksi satu sama lain sebagai bentuk intensnya jangkauan media. Aksi oleh negara, kepentingan korporat bisnis, NGO dan masyarakat sipil secara umum (melalui demonstrasi, serangan dan sebagainya) skala lokal dapat menjadi *publicsphere* skala transnasional, dimana kemudian menghasut reaksi dan tanggapan diskursif di berbagai daerah dan negara. Ini telah menunjukkan sifat representatif dari media. Para pemimpin politik tidak mampu mengabaikan opini publik yang terartikulasi melalui media global, sebab opini publik transnasional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dasar kekuasaan politik nasional.

Dalam keadaan tertentu, kekuatan opini publik global tersebut dapat menjadi tekanan berat untuk negara-negara kuat (Castells 1997, 314), karena biasanya opini publik menuntut tindakan politik yang bertentangan dengan kebijakan nasional, ekonomi, militer dan kebijakan lainnya dari suatu negara. Dan ini jelas nampak ketika Mesir, negara yang hampir setengah abad 'nyaman' dengan kondisi penindasan pemerintahan diktator dengan dwifungsi militer, tiba-tiba menginginkan pembubaran pemerintahan Mubarak dan menuntut demokrasi kerakyatan. Meskipun fenomena tersebut tergolong fenomena yang cukup besar di dalam hubungan internasional namun tidak dapat disangkal meskipun opini publik transnasional bisa sangat kuat karena adanya liputan media yang intensif, seringkali atensi publik kurang sepadan. Ini dapat dilihat dari jarangnyanya ada sebuah dialog transnasional yang melibatkan pembicara dari segala kalangan. Biasanya yang menjadi pembicara dalam acara *prime time* membahas kasus Mesir di CNN, BBC, atau media lokal adalah kaum elit kosmopolitan seperti diplomat, ahli NGO, eksekutif bisnis transnasional dan sebagainya. Jarang ada yang melibatkan rakyat Mesir atau rakyat negara lain yang mengkritisi kondisi tersebut. Karena itu, meskipun media berita semakin melampaui batas-batas nasional, hal ini tidak sendirinya menciptakan *publicsphere* pada tingkat transnasional atau global. Globalisasi ekonomi, pemerintahan dan budaya belum disertai dengan globalisasi yang sama dari *publicsphere*. Pembentukan opini masih sangat terikat pada lembaga politik nasional.

Terjadi pertentangan di antara kaum hiperglobalis dan kaum skeptis mengenai peran media dalam penciptaan *publicsphere* ini. Kaum hiperglobalis menyatakan bahwa *publicsphere* global telah muncul dan meniadakan *publicsphere* nasional dimana tidak ada batasan yang jelas sehingga mudah dipengaruhi oleh media lokal dan global. Argumen ini didukung fakta bahwa selama ini opini publik yang berlangsung secara global mampu melampaui opini publik dalam skala lokal, seperti yang dikatakan George Bush, "I learn more from the CNN than I do from the CIA" (Taylor 1997, 92) dan Jimmy Carter, "CNN has done more to close gaps of misunderstanding between the world's people than any enterprise in recent memory" (Flourney & Stewart 1997, vii). Secara khusus program CNN seperti 'World Report' bersama lembaga penyiaran di seluruh dunia menjadi bukti munculnya sistem media yang benar-benar global. Volkmer (1999) menafsirkan perkembangan ini tidak hanya sebagai ekspansi geografis dari *publicsphere* namun juga perubahan hubungan antara masyarakat, media dan negara. Dapat dikatakan bahwa karena komunikasi global, masyarakat dan pendapatnya tidak lagi menjadi elemen substansial dari sistem politik nasional, melainkan telah berubah menjadi *publicsphere* global yang dianggap bukan hanya sebagai ruang antara 'publik' dan negara tetapi antara negara dan ekstra-sosial atau komunitas global (*global village*) (Volkmer 1999, 119).

Sementara kaum skeptis memberikan dua kritik. *Pertama*, kritik berdasarkan analisis budaya dan kelembagaan mengenai proses transnasionalisasi (Collins 1994, 1996, dan 1998; Schlesinger 1993 dan 1999). Dan *kedua*, kritik terhadap globalisasi media yang didasarkan pada tradisi ekonomi politik (Schiller 1993 dan Sparks 1998). Kedua kritik ini sama-sama memiliki titik awal terkait dampak global dari sebuah media global. Kritik *pertama* menganggap media transnasional hanya memiliki jangkauan regional atau bahkan hanya dalam wilayah utama mereka, tanpa memiliki penetrasi universal. Sama halnya dengan media global seperti CNN dan BBC World, secara teknis memang hampir memiliki jangkauan global dan semua negara dapat mengaksesnya. Tetapi bila melihat angka dan *rating* penonton yang sebenarnya menunjukkan fakta yang berbeda. Dibandingkan dengan konsumsi media nasional, CNN dan BBC World sangat terbatas. Di sebagian besar negara, saluran ini hanya digunakan sebagai suplemen bagi berita dari media nasional, dan penggunaan saluran luar negeri ini umumnya terbatas pada strata sosial yang terdidik, elit politik dan bisnis. Peningkatan animo pada saluran CNN dan BBC rupanya juga tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama. Studi terhadap penonton menunjukkan bahwa selama Perang Teluk, yang merupakan momentum kesuksesan CNN, tidak mampu menjaga angka penonton

yang tinggi setaelahnya (Gutstadt 1993). Jadi menurut kaum skeptis, label 'media global' sebenarnya kurang tepat. Audiens global tidak semuanya memiliki konsern yang sama ke dalam media global yang sama dan pada waktu yang sama pula meski konten berita yang dibentuk oleh media telah menjadi agenda transnasional bahkan internasional. Sehingga pada akhirnya media tidak membentuk *publicsphere* global.

Dalam kritik *kedua* mengenai tradisi ekonomi politik berasumsi bahwa konglomerat media global berperan penting dalam mendominasi industri media dunia. Teknologi komunikasi dan informasi menjadi sebuah komoditas bisnis yang menjanjikan. Komersialisasi informasi dibarengi dengan komodifikasi budaya dan politik dapat menciptakan sebuah komunikasi politik yang kreatif. Hal ini dipertegas dengan pendapat Schiller (1993, 47),

*"I do not believe that globalization of the media industries sector has resulted in the formation of an international civil society as such. Rather, this process has resulted in an international order organized by transnational economic interests that are largely unaccountable to the nation-states in which they operate."*

Sehingga bila dilihat dari sudut pandang ekonomi politik, masyarakat sipil atau musyawarah publik tidak terlalu berperan dalam *publicsphere*, melainkan globalisasi industri media yang menekankan komersialisasi berita. Kemampuan rakyat untuk mempengaruhi perdebatan publik dan pembentukan opini berkurang karena industri besar media tidak lagi bertanggung jawab kepada regulasi politik nasional. Ini menandakan bahwa privatisasi terkadang justru menutup akses publik untuk mendapatkan *publicsphere* yang benar-benar pro rakyat. Pendapat ini agak bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Mesir yang justru dengan intervensi pemerintah tidak terjadi demokrasi.

Menurut Schlesinger (1999, 21), sebuah wacana global dapat menjadi lokal ketika media dapat membahasakan informasi secara domestik. Proses domestikasi berita luar negeri disesuaikan pada tingkat penerimaan penonton. Penelitian empiris menunjukkan bahwa interpretasi pemirsa atas berita asing dipengaruhi oleh bagaimana mereka melihat posisi bangsa mereka sendiri di dunia (Jensen 1998). Meski kaum hiperglobalis dan skeptis berargumen bahwa '*there is nothing new under the sun*' akan menjadi berbeda apabila media mampu membahasakannya dengan menarik. Pembentukan ruang komunikatif publik pada tingkat transnasional tidak selalu menimbulkan ancaman bagi lingkungan publik nasional, bahkan prekondisi ini memungkinkannya

terbentuknya *publicsphere* nasional atau bahkan forum publik transnasional. Seperti argumen Köhler, "*it is the state itself which, as a result of the need to adapt to processes of globalization and by the increasing involvement in intergovernmental cooperation, provides the impetus for the cosmopolitan enlargement of its own public sphere*" (Köhler 1998, 233-34). *Public sphere* secara konseptual dan historis terikat dengan negara-bangsa. Sebagian besar diskusi *publicsphere* global merupakan model nasional yang diperpanjang secara geografis, tidak berbeda, hanya lebih besar. Dengan demikian, *publicsphere* global juga digambarkan terbatas pada wilayah yang terdefinisi baik secara geografis atau secara kelembagaan khusus, misalnya musyawarah dalam PBB, Uni Eropa dan lembaga masyarakat sipil global lainnya, Sehingga *publicsphere* global ini dikarakteristik an sama seperti ruang publik nasional, yakni bersifat universal, akses merata di antara semua warga negara, dan terbuka bagi perdebatan atas semua masalah kepentingan umum, dengan asas *non-specialized and non-professionalized* bagi debat publik.

Namun ada batasan seperti bagaimana *publicsphere* global ini dapat diimplementasikan ke *publicsphere* nasional, serta bagaimana mereka berkembang dan mentransformasikan deliberasi publik. Globalisasi memang merubah struktur *publicsphere*, tetapi tidak selalu membuat yang baru dan badan lingkup publik yang lebih besar. Contohnya negara Libya, Yaman dan Bahrain yang hingga saat ini masih gagal menciptakan demokrasi di negaranya (www.voaindonesia.com 2013). Akan tetapi melalui globalisasi setidaknya mampu mengakselerasi keterkaitan yang selama ini dipisahkan oleh jarak dan waktu, juga menghadirkan keterbukaan antar profesi dan ketergantungan antara *publicsphere* nasional dan publik, sehingga forum yang satu dapat mempengaruhi forum-forum lainnya. Aktornya tidak hanya negara, dan isunya pun tidak berfokus pada *hard politics* saja seperti politik dan militer, namun juga isu-isu *low politics* seperti demokrasi, budaya ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses tersebut dapat digambarkan sebagai deterritorialisasi bertahap dari sebuah *publicsphere* (Tomlinson 1999).

Munculnya *publicsphere* nasional mendorong media menjadi lebih mandiri dan tidak terikat pada partai politik, meski memang masih ditemukan media yang masih menunjukkan kecenderungan dan keberpihakan karena kepemilikan media oleh entitas politik tertentu. Namun bagaimana pun, konsep ideal dari media ialah menjalankan perannya sebagai *watchdog* dan menghadirkan informasi-informasi yang mempengaruhi jalannya perpolitikan suatu negara. Sama halnya dengan media komersial, harus lebih dianggap sebagai institusi

media yang kegiatannya diatur oleh status mereka sebagai perusahaan media komersial dan bukan oleh kewajiban politik. Media harus menjalankan fungsinya sebagai mediator publisitas dan menjadi institusi politik dalam batasan-batasan tertentu (Cook 1998).

### **Kesimpulan dan Opini**

Penulis kembali menekankan posisi setuju bahwa *cyberspace*, politik informasional dan *publicsphere* saling berkaitan satu sama lain. Dimana ciri khasnya terletak pada media yang menjadi penghubung warga negara dalam tindakan-tindakan politik mereka. Dalam konteks politik demokrasi, akses ke institusi-institusi negara tergantung kemampuan memobilisasi mayoritas penduduk melalui pemilu. Dalam kasus demokratisasi di Mesir, rakyat berusaha mengumpulkan informasi dan membentuk pendapat melalui twitter, facebook dan jejaring sosial lainnya sebagai pengejawantahan *cyberspace*. Sama halnya untuk mendapat dukungan dan mempengaruhi masyarakat, partai politik menggunakan media. Agar masuk dalam (peliputan) media-media besar, institusi-institusi politik harus menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan logika media. Maka dikatakan, media mampu mendingkai politik. Inilah yang dimaksud sebagai politik informasional.

Media membentuk, mendingkai, menangkap peluang politik (dan juga bisnis). Tanpa kehadiran aktif di media, gagasan politik tak akan mendapat dukungan luas. Media-media besar (*mainstream media*) seperti BBC, CNN, Twitter dan Facebook adalah kelompok-kelompok bisnis yang makin terkonsentrasi dan terhubung secara global, dengan tema dan pangsa pasar yang luas. Yang menjadi ukuran dalam kesuksesan sebuah media adalah peringkat pemirsa karena inilah patokan para pengiklan yang merupakan sumber dana utama. Namun demikian, media tetap memegang klaim otonomi politik yang bersumber pada ideologi profesi atau kode etik jurnalistik, yaitu tidak berpihak dan berjarak atau '*detachment is the rule*'. Akibatnya di satu pihak media harus dekat dengan sumber berita politik dan pemerintah, agar mudah mengakses informasi; mendapat keuntungan dari regulasi; dan mendapatkan subsidi di negara-negara tertentu. Namun di lain pihak, media harus cukup netral dan berjarak untuk menjaga kredibilitas sebagai penengah antara warga dan partai dalam produksi dan konsumsi arus informasi. Sayangnya ini belum nampak pada media-media yang dikuasai pemerintahan dan partai politik di Mesir yang secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan pada rezim yang

berkuasa. Meskipun media independen di Mesir telah berusaha menyajikan pemberitaan yang netral, namun pemerintah tetap melakukan kontrol atasnya, belum lagi harga jual yang sangat mahal mengakibatkan tidak semua rakyat mampu mengakses berita yang berimbang tersebut. Ini yang mendorong rakyat lebih memilih menggunakan *cyberspace*.

*Publicsphere* dan *cyberspace* yang didominasi oleh media bukan berarti bahwa media menentukan segala tingkah laku politik yang ada, melainkan sebuah proses sosial dan politik yang lebih terbuka, yang memungkinkan adanya penyebaran demokrasi terlepas dari adanya isu keberpihakan media ke salah satu pandangan politik. Karakteristik yang muncul dalam *informational politics* juga tidak hanya pada proses pemilihan umum saja namun juga dalam pengambilan keputusan, tatanan pemerintah, serta memodifikasi hubungan yang terjalin antara negara dan masyarakat seperti demokratisasi yang terjadi di Mesir.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Castells, Manuel, 1997. "Informational Politics and the Crisis of Democracy" dalam *The Power of Identity*, Oxford: Blackwell Publisher
- Cook, Timothy E., 1998. *Governing with the News. The News Media as a Political Institution*. Chicago: University of Chicago Press.
- Collins, Richard, 1994. *Broadcasting and Audio-Visual Policy in the European Single Market*, London: John Libbey.
- \_\_\_\_\_, 1996. "Europæisk Kultur - et Fantasifoster? [European Culture - a Chimera?]" dalam *MedieKultur nr. 25, September 1996*.
- \_\_\_\_\_, 1998. *From Satellite to Single Market*. London: Routledge.
- Flourney, Don M. dan Robert K. Stewart, 1997. *CNN. Making News in the Global Market*, Luton: University of Luton Press.
- Gibson, William, 1984. *Neuromancer*. New York: The Berkley Publishing Group.
- Giddens, Anthony, 1999. *Runaway World. How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Gutstadt, L. E., 1993. 'Taking the Pulse of the CNN Audience: A Case Study of The Gulf War', *Political Communication*, **10**

- Köhler, Martin, 1998. "From the National to the Cosmopolitan Public Sphere", dalam Daniele Archibugi, David Held, dan Martin Köhler (eds.), t.t. *Re-imagining Political Community. Studies in Cosmopolitan Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- Lyon, David, 2002. "Cyberspace: Beyond the Information Society?" dalam Armitage dan Roberts. *Living with Cyberspace: Technology and Society in the 21<sup>st</sup> Century*. London: Continuum.
- Moore, Richard K., 1999. "Democracy and Cyberspace" dalam *Discourse and Decision Making in the Information Age*, London: Routledge.
- Schlesinger, Philip, 1993. "Wishful Thinking: Cultural Politics, Media, and Collective Identities in Europe", *Journal of Communication*, **43**(2). New York: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Media and Belonging: Changing Communicative Spaces and the European Union, Paper Presented to Conference "Reimagining belonging"*. Aalborg University.
- Sparks, Colin, 1998. "Is There a Global Public Sphere?" dalam Daya K. Thussu (ed.), t.t. *Electronic Empires. Global Media and Local Resistance*, London: Arnold.
- Schiller, Herbert In, 1993. "Transnational Media: Creating Consumers Worldwide", *International Affairs*, **47**(1), Summer 1993.
- Taylor, Philip M., 1997. *Global Communications, International Affairs and The Media Since 1945*, London: Routledge.
- Tomlinson, John, 1999. *Globalization and Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Volkmer, Ingrid, 1999. *News in the Global Sphere. A Study of CNN and Its Impact on Global Communication*, Luton: University of Luton Press.

### **Artikel Online**

- AhramOnline, 2013. *Egypt Court Orders Retrial of Mubarak, El-Adly*. [online]. dalam <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/62357/Egypt/Politics-/Egypt-court-orders-retrial-of-Mubarak,-ElAdly-.aspx> [diakses pada 13 Januari 2013].
- BBC, 2013. *Court in Egypt Orders Retrial for Mubarak After Appeal*. [online]. dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21002912> [diakses pada 13 Januari 2013]
- CNN, 2011. *Egypt Protest Update*. [online]. dalam <http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2011/01/29/endo.egypt.protest.update.cnn?iref=allsearch> [diakses pada 13 Januari 2013].
- Fathoni, Rois Rahma, 2011. *Gagasan Hukum Media Online: Demokrasi Mesir*. [online]. dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/rois-rahma-fathoni-lc/> [diakses pada 13 Januari 2013].

- Gross, Pamela M., t.t. *Press Reference: Background & General Characteristics Egypt's Press*. [online]. dalam <http://www.pressreference.com/Co-Fa/Egypt.html>) [diakses pada 13 Januari 2013]
- Philip, Howard, 2011. [online]. dalam <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/251769-jejaring-sosial-berperan-dalam-revolusi-mesir>) [diakses pada 13 Januari 2013].
- VOAIndonesia, 13 Januari 2013. *Media Iran: Morsi Ingin Perkuat Hubungan Mesir-Iran*. [online]. dalam <http://www.voaindonesia.com/content/media-iran-morsi-ingin-perkuat-hubungan-mesir-iran/1248710.html>) [diakses pada 13 Januari 2013].
- \_\_\_\_\_, 13 Januari 2013. *Demonstran Pro Demokrasi Adakan Rapat Umum di Bahrain*. [online]. Dalam <http://www.voaindonesia.com/content/demonstran-pro-demokrasi-adakan-rapat-umum-di-bahrain-136888728/103142.html>) [diakses pada 14 Januari 2013].